



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023-2026

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

KATA PENGANTAR

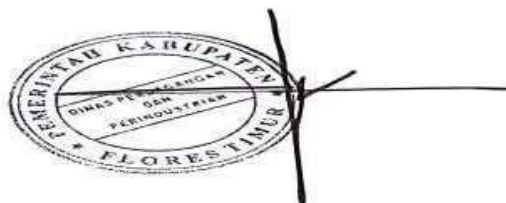
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan hikmatNya kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur untuk periode 2023 – 2026. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran kedepan yang ingin dicapai/ diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026, serta mempedomani kebijakan pemerintah yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 dan Permendagri 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur memuat tentang permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kinerja penyelenggaraan urusan dibidang perdagangan dan perindustrian serta program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur. Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman/acuan untuk 3 (tiga) tahun ke depan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Lakip serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Mengingat berbagai keterbatasan, rencana strategis ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran-saran demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap semoga Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan, khususnya untuk pengembangan sektor Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Flores Timur yang lebih baik.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur



Siprianus Sina Ritan, S.Sos. M.Si

Pembina Pembina Utama Muda
NIP.19701231 199903 1 056

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
PERATURANBUPATI	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	II-17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Perangkat Daerah.....	III-2
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	III-2
3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan hidup Strategis.....	III-5
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	I-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I-12
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berstatus PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... II-12
Tabel 2.3	Sarana Prasarana Kantor..... II-13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-15
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah..... II-16
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian..... III-1
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Disperdagind Kabupaten Flores Timur berdasarkan RenstraKementrian Perdagangan dan Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... III-3
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... III-5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daearah. V-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah..... VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan..... VII-1
Tabel 7.2	Target kinerja bidang urusan..... VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.....	I-1
Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra Disperdagind Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran.....	I-2
Gambara 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas perdagangan dan Perindustrian.....	II-4



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORESTIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

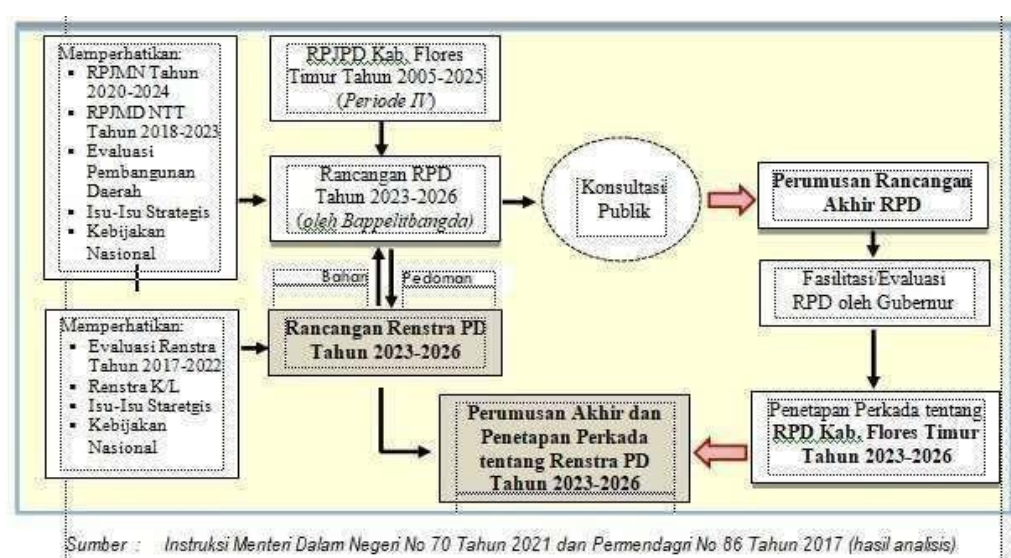
Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

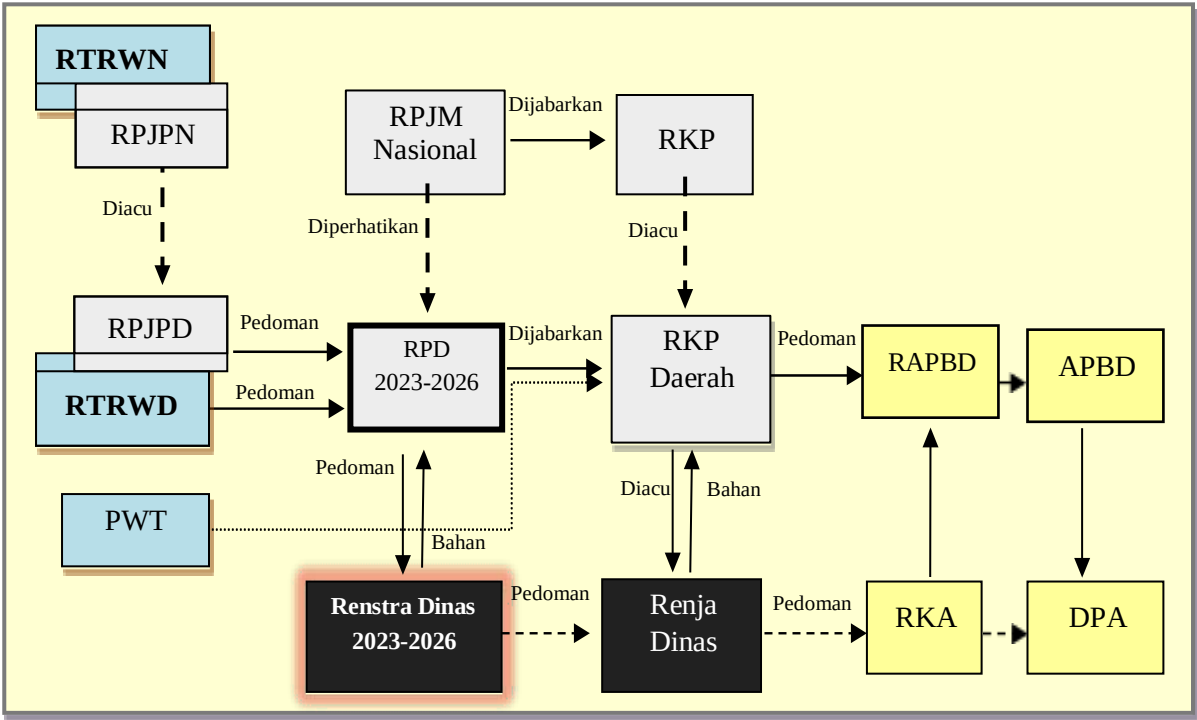
Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Gambar 1.1
Alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2
Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Intruksi Meteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025’
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur ;

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur dan Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati Flores Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian energi dan sumber daya mineral dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan bidang perdagangan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral.
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan. Perindustrian , energy dan sumber daya mineral
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas
 - d. Pembinaan ,pengorganisasian dan pengendalian urusan perdagangan,perindustrian , energy dan mineral
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat Sekertariat dipimpin oleh Sekertaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, Kepegawaian dan Keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Dinas dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
 - b. Penyusunan program dan anggaran
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perindustrian dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

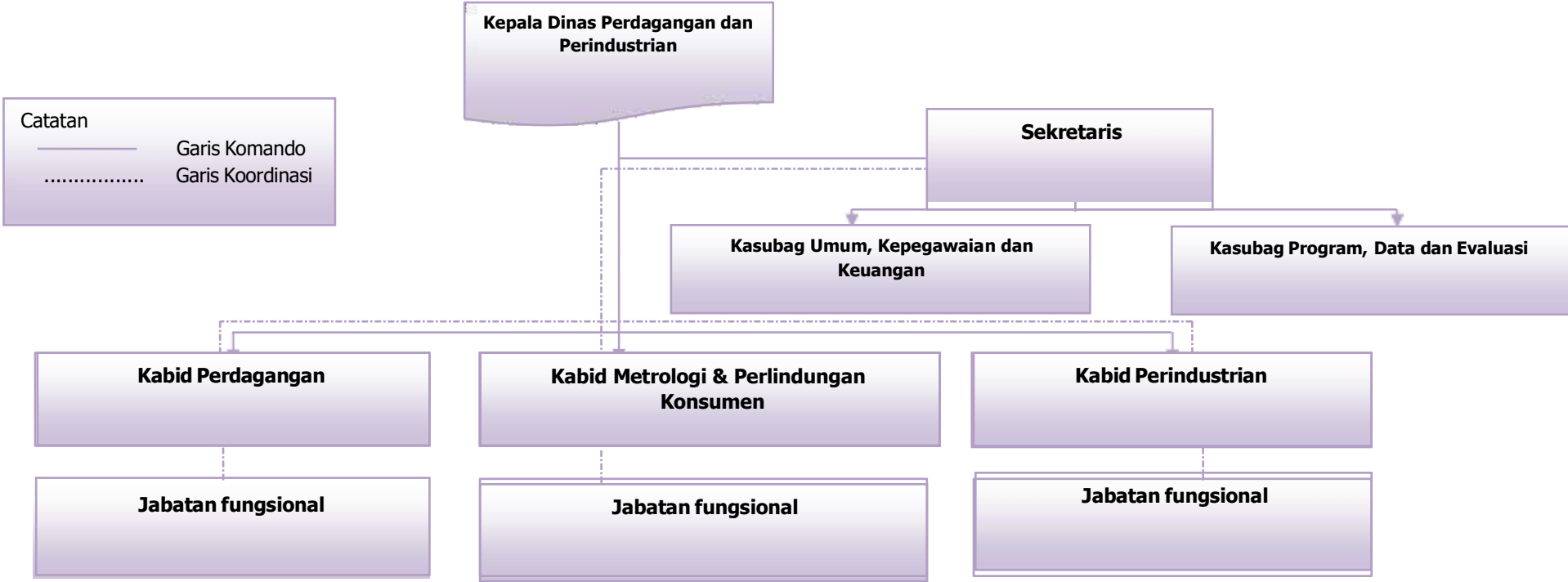
- a. Penyusunan rencana kerja perindustrian
 - b. Perumusan kebijakan teknis perindustrian
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perindustrian
 - d. Pengendalian , evaluasi dan pelaporan perindustrian
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perdagangan dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
- a. Penyusunan rencana kerja perdagangan
 - b. Perumusan kebijakan teknis perdagangan
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perdagangan
 - d. Pengendalian , evaluasi dan pelaporan perdagangan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Metrologi dan Perlindungan Konsumen dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
- a. Penyusunan rencana kerja Metrologi dan Perlindungan Konsumen
 - b. Perumusan kebijakan teknis Metrologi dan Perlindungan Konsumen
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Metrologi dan Perlindungan Konsumen
 - d. Pengendalian , evaluasi dan pelaporan Metrologi dan Perlindungan Konsumen
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/ daerah serta urusan kepegawaian dan Juga Menyenggarakan fungsi Sebagai Berikut:
- a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas, dan juga menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

9. Jabatan Pelaksana

GAMBAR 2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten
Flores Timur



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dan potensi lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur berdasarkan data pada tahun 2021 akhir adalah sebanyak 51 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasar kan Golongan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan IV	:	4	Orang
Golongan III	:	17	Orang
Golongan II	:	1	Orang
Golongan I	:	-	Orang
Jumlah	:	22	Orang

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

2. Jumlah personil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan

Untuk mengetahui jumlah personil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2. 2 berikut ini ;

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berstatus PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Magister (S2)	:	2	Orang
Sarjana (S1)	:	12	Orang
Sarjana Muda	:	2	Orang
SMU (Sederajat)	:	5	Orang
SLTP (Sederajat)	:	-	Orang
SD (Sederajat)	:	-	Orang
Jumlah	:	22	Orang

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

2. Aset yang Dikelola

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara dalam pelaksanaan Tupoksinya. Sarana prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya. Keadaan aset yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3. Sarana Prasarana Kantor

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)
1	3	3	4	5
1	Gedung	1	Unit	Baik
2	A.C. Split	6	Unit	Baik
3	Meja Kerja Pejabat	14	Buah	Baik
3	Lap Top	12	unit	Baik
4	Lap Top	4	Unit	Rusak
5	Komputer	4	unit	Rusak
6	Lemari Kayu	21	Buah	Baik
7	Rak Kayu	5	Buah	Baik
8	Meja Rapat	3	Buah	Baik
9	Meja Kerja Kayu	14	Buah	Baik
10	Rak Kayu	8	Buah	Baik
11	Kendaraan Roda 4	3	Unit	Baik
12	Sepeda Motor	4	unit	Baik
13	Overhead Projector	1	Unit	Baik
14	Kursi Kayu	12	Buah	Baik
15	Kursi Rapat	15	Buah	Baik
16	Televisi	1	Buah	Baik
17	Treng Air/Tandon Air	1	Buah	Baik
18	Kipas Angin	6	Buah	Baik
19	Gordyin/Kray	1	Paket	Baik
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	unit	Baik
21	Lemari Kaca	2	Buah	Baik
22	Papan Nama Instansi	1	buah	Baik
23	Sofa	2	Set	Baik
24	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	set	Baik

25	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	Set	Baik
26	Stopwatch	1	buah	Baik
27	Bejana Ukur	2	buah	Baik
28	Timbangan Dacin Kuningan	2	set	Baik
29	Anak Timbangan Miligram Aluminium	1	set	Baik
30	Anak Timbangan Bidur	25	buah	Baik
31	anak timbangan/biara lainnya (dst)	5	set	Baik
32	Anak Timbangan Miligram	12	Set	Baik
33	Meja Kera Besi	4	Buah	Baik
34	Meja Tahan Getar	1	Buah	Baik
35	perkakas bengkel kerja lainnya	9	Set	Baik
36	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	9	set	Baik

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Flores Timur

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, Tugas Pembantuan, Besarnya anggaran dan capaian kinerja keuangan selama 5 (lima) Tahun dan Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021 urusan Perdagangan dan Perindustrian, dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Urusan perdagangan																
	Jumlah produk yang diekspor (ton)		43.52 0,64	43.52 0,64	43.5 20,6 4	43.52 0,64	43.52 0,64	0	0	0	0		0%	0%	0 %	0 %	0%
	Persentase perlindungan konsumen dan produsen		23%	25%	28%	35%	40%	50%	50%	50%	50%		217%	200%	178%	142%	
	Jumlah pasar desa dan daerah (rehabilitas)		3 pasar	5 pasar	4 pasar	2 pasar	3 pasar	5 pasar	4 pasar	0	0		166 %	80%	0%	0%	0%
2.	Urusan perindustrian																
	Persentase pertumbuhan industri rumah tangga (home industry)		1,7%	2,5%	3,0 %	5,0%	5,5%	1,1%	2,2%	2,0%	5,0%		76,5%	91%	66,6%	90%	
	Cakupan bina kelompok pengrajin		8 klpk	5 klpk	7 klpk	4 klpk	10 klpk	8 klpk	5 klpk	1 klpk	14 klpk		100%	100%	25%	350%	

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggar an	Re ali sa si
Belanja ProgramPD	946.291.500	1.108.146.000	781.462.750	2.237.212.083	2.117.729.516	891.427.900	1.091.130.800	770.532.849	2.126.269.902		94,20%	99,97 %	98,6%	95%			
Belanja Program urusan Perdaganga n	4.707.118.681	3.615.345.613	187.069.800	1.453.492.500	367.485.200	4.461.421.500	3.288.751.263	179.669.8000	871.678.100		94,8%	91,0%	96,0%	60,0%			
Belanja Program urusan Perindustria n	1.008.711.000	835.429.400	37.902.500	225.680.000	427.514.800	943.332.000	809.727.000	37.552.500	225.674.262		93,52%	96,92 %	99,1%	99,997%			

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan :

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur . Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari daerah kepulauan, kondisi ini sudah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian. Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur telah berupaya meningkatkan perdagangan dan perindustrian yang mandiri serta berdaya saing melalui program atau kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Adapun hasil dari program atau kegiatan tersebut antara lain: terlaksananya bimtek manajemen industri, pembinaan dan pelatihan kepada IKM, revitalisasi pasar yang tersebar di 19 kecamatan, pengawasan terhadap UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), serta pengawasan terhadap peredaran barang/ jasa dan barang berbahaya lainnya.

Pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tidak lepas dari tantangan yang di hadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pasar yang belum memadai
1. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (Lemahnya organisasi dan kurang berfungsinya unsur – unsur manajemen didalam mengelola administrasi serta sering terjadi pelaksanaan Tupoksi yang kurang sesuai).
2. Lemahnya akses pemasaran produk IKM.
3. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengerajin industri kecil terutamadalam *design*, paking dan *finishing* produk kerajinan industri kecil.
4. Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produkyang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.
5. Produk yangdihasilkan IKM belum mempunyai daya jual yangtinggi.
6. Keterbatasan dalam mengakses permodalan;
7. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

2. Peluang :

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Walaupun masalah atau hambatan yang dihadapi yang tidak dapat dihindari karena sifatnya dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan. Namun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur senantiasa mengupayakan penanganan

maupun pengelolaan sehingga masalah ataupun tantangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Flores Timur

dapat sejalan dengan tupoksi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peluang yang adadilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud sebagai berikut :

- a. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan Industri dan Perdagangan
- b. Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barangdan jasa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
SRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi masalah merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah- masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya daya saingekonomi	• Rendahnya Kualitas Produksi, Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	▪ Belum optimalnya penguatan kelembangan industri ▪ Rendahnya kualitas produksi ▪ Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
		• Rendahnya Nilai tambah sector penyumbang PDRB	▪ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi ▪ Belum tersedianya Sistem dan jaringan pemasaran
		• Rendahnya Pengawasan dan Pengendalian harga bahan pokok melalui aplikasi secara berkala	▪ Belum optimalnya Pengendalian bongkar muat barang ▪ Belumnya optimalnya publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi

Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026 tidak ada visi misi Daerah, namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Disperdagind Kabupaten Flores Timur berdasarkan Renstra Kementrian Perdagangan dan Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Nomor / Sasaran Jangka Menengah Kementrian Perdagangan		Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG (Sistem Resi Gudang), dan Pasar Lelang.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Flotim masih ada yang tidak layak untuk kegiatan berjualan bagi pedagang	Masih banyaknya pasar yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan.	Adanya program atau kegiatan yang mendukung terlaksananya revitalisasi pasar.
2	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa.	Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Kurangnya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan tidak tertib niaga.	Masih kurangnya kesadaran pedagang atau pelaku usaha untuk ditera dan ditera ulang timbangannya. Kurangnya dukungan dana melalui APBD	Adanya program atau kegiatan yang mendukung kemetrollogian dan tertib niaga.

Nomor / Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian		Program Prioritas Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya peran IKM dalam Perekonomian Nasional	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Kurangnya inovasi dari pengrajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.	Minimnya kesadaran pengrajin akan pengembangan usaha lain yang lebih produktif dan ekonomis serta pemanfaatan sumber daya.	Tersedianya wadah berupa program dan kegiatan dalam upaya pengembangan usaha perindustrian secara sistematis dan bertahap.
2	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Penguasaan Teknologi.			Masih adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha.	Adanya bimbingan teknis, pelatihan/ pembinaan, dan magang untuk penguasaan teknologi secara bertahap.
3	Meningkatnya Penguasaan Pasar di Dalam dan Luar Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Tingginya biaya promosi produk unggulan daerah serta terbatasnya pilihan mitra usaha regional.	Adanya program/ kegiatan yang mendukung untuk promosi dan tingginya komitmen Pemerintah Daerah untuk pengembangan daya saing produk.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur menjadi bagian penting dalam menyusun Renstra PD. Hal ini dimaksudkan untuk adanya keselarasan antara kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dengan kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, sehingga dengan demikian terwujud pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya :

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Lokasi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Pengembangan Kawasan peruntukan Industri	Kec. Wotan ulumado, Kec. Depog, Adobar, Adotim, Ile Boleng, Ile Mandiri, Larantuka, Witihama	Perlu penetapan lokasi pembangunan sentra industri dalam kaitan dengan RPIK di Wilayah Kecamatan Ile Mandiri dan untuk Kawasan Industri telah ditetapkan dalam RTRW namun kondisi lapangan tidak memungkinkan pembangunan dikarenakan kondisi keuangan daerah belum memadai.	Belum adanya penyerahan tanah dari masyarakat kepada pemerintah di daerah untuk pembangunan industri	Perlunya pengembangan kawasan industri untuk pelaksanaan kompetensi Industri

Rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Terkait dengan keselarasan dan keserasian pembangunan, maka telaahan tata ruang yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang perlu dicermati adalah “Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri”. Mencermati telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur akan melaksanakan Pembinaan industri kecil, pelatihan industri Kecil, bimbingan teknis manajemen industri dan magang industri guna pengembangan wilayah industri dan

pembangunan sentra industry yang tersebar di 8 kecamatan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM serta dapat dijual dipasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Kondisi industri kecil dan menengah di Kabupaten Flores Timur, secara umum masih perlu dilakukan peningkatan Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Hal ini menjadi salah satu tugas pemerintah. Indikator utama peningkatan nilai produksi adalah kemampuan pelaku industri kecil dan menengah memproduksi produk yang mempunyai daya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi dan kekhasan daerah. Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perdagangan dan perindustrian dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
2. Belum optimalnya pengembangan agroindustri
3. Rendahnya nilai tambah sector penyumbang PDRB
4. Belum optimalnya pengawasan harga bahan pokok
5. Belum optimalnya perlindungan dan pengamanan konsumen

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:1.Permasalahan Bidang Sekretariat, Permasalahan Bidang Perdagangan. 3.Permasalahan Bidang Perindustrian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB sector industry pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,33	1,25	1,75	2,15	2,94	
		• Meningkatkan pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,59	4,61	4,65	4,71	
		• Meningkatanya Laju inflasi daerah	Laju InflasiDaerah	-2,02	0,45	0,45	0,55	0,55	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu 4 (empat) tahun. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengalokasian penanganan masalah - masalah Perdagangan dan Perindustrian yang mendesak/urgen yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB sector industry pengolahan	Meningkatkan Kualitas Produksi, Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Penguatan kelembagaan Industri	Peningkatan Kualitas Produksi	Promosi dan Pemasaran produk unggulan daerah	
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Meningkatkan Nilaitambah sector penyumbang PDRB	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi			
			Perluasan system dan jaringan pemasaran			
	Meningkatnya laju inflasi daerah	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian harga bahan pokok melalui aplikasi secara berkala	Pengendalian bongkar muat barang			
			Publikasi Harga Bahan Pokok melalui aplikasi			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam Renstra 2023-2026 maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur akan menjalankan 4 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAANKABUPATEN FLORES TIMUR
PERIODE 2023-2026

Tujua n	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	PRp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
				-			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB sector industry						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan			0.33 %	1,25 %	0.00	1,75 %	0.00	2,15 %	0.00	2,94 %	0.00	2,94 %	0.00			
		-	TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
		Pertumbuhan PDRB			0.55 %	4,59 %	0.00	4,61 %	0.00	4,65 %	0.00	4,71 %	0.00	4,71 %	0.00			
		-	TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	Meningkatanya Laju inflasi daerah						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
		Laju Inflasi Daerah			-2.02	0,45 Poin	0.00	0,45 Poin	0.00	0,55 Poin	0.00	0,55 Poin	0.00	0,55	0.00			
		-	TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TUJUAN DAN SASARAN							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
TIDAK MEMILIKI SASARAN							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	100 %	2,296,814,840.00	100 %	2,233,192,096.00	100 %	2,198,318,687.00	100 %	2,482,804,246.00	100 %	2,482,804,246.00	100 %	0.00	DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00		
			Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	0	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		64,500,000.00		72,000,000.00		54,000,000.00		98,500,000.00		98,500,000.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN		
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	27,500,000.00	2 Dokumen	27,500,000.00	2 Dokumen	27,500,000.00	2 Dokumen	27,500,000.00	8 Dokume n	27,500,000.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN		
	3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14,000,000.00	1 Dokumen	14,500,000.00	1 Dokumen	9,500,000.00	1 Dokumen	23,000,000.00	5 Dokume n	23,000,000.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN		
	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	15,000,000.00	6 Laporan	18,000,000.00	6 Laporan	10,000,000.00	6 Laporan	23,000,000.00	24 Laporan	23,000,000.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN		
	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	8,000,000.00	4 Laporan	12,000,000.00	4 Laporan	7,000,000.00	4 Laporan	25,000,000.00	16 Laporan	25,000,000.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN		
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0		1,588,142,096.00		1,592,142,096.00		1,579,142,096.00		1,595,642,096.00		1,595,642,096.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN			
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22/14 Orang/b ulan	23/14 Orang/bulan	1,548,142,096.00	23/14 Orang/bulan	1,548,142,096.00	23/14 Orang/bulan	1,548,142,096.00	23/14 Orang/bulan	1,548,142,096.00	23/14 Orang/b ulan	1,548,142,096.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN			
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN	12 Dokumen	0 Dokumen	0.00	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	36 Dokume n	20,000,000.00		DINAS PERDAGANGANDAN PERINDUSTRIAN			

Tujua n	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	12 Dokumen	0.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	2 Laporan	24,000,000.00	2 Laporan	11,000,000.00	2 Laporan	27,500,000.00	8 Laporan	27,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0		10,000,000.00		12,000,000.00		9,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	3 Dokumen	5,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000.00	6 Laporan	5,000,000.00	6 Laporan	5,000,000.00	6 Laporan	5,000,000.00	20 Laporan	5,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0 Laporan	0.00	6 Laporan	2,000,000.00	6 Laporan	2,000,000.00	6 Laporan	5,000,000.00	18 Laporan	5,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0		53,000,000.00		20,000,000.00		40,700,000.00		65,000,000.00		65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0 Dokumen	0.00	12 Dokumen	10,000,000.00	12 Dokumen	15,500,000.00	12 Dokumen	30,000,000.00	36 Dokumen	30,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	5,200,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	4 Dokumen	15,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	3 Orang	30,000,000.00	0 Orang	0.00	3 Orang	20,000,000.00	2 Orang	20,000,000.00	8 Orang	20,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1 Orang	15,000,000.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0		132,772,744.00		117,150,000.00		102,681,402.00		110,062,650.00		110,062,650.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2,500,000.00	3 Paket	2,500,000.00	3 Paket	2,800,000.00	3 Paket	2,800,000.00	12 Paket	2,800,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	21,500,000.00	2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	6,000,000.00	2 Paket	6,000,000.00	8 Paket	6,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,000,000.00	1 Paket	6,000,000.00	1 Paket	4,000,000.00	1 Paket	6,000,000.00	4 Paket	6,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21,000,000.00	1 Paket	7,000,000.00	1 Paket	7,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	4 Paket	10,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,772,744.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	6,081,402.00	1 Paket	7,462,650.00	4 Paket	7,462,650.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	1 Dokumen	1,650,000.00	1 Dokumen	1,800,000.00	1 Dokumen	1,800,000.00	4 Dokumen	1,800,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000.00	12 Laporan	20,000,000.00	12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	21,000,000.00	48 Laporan	21,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	54,500,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	48 Laporan	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujua n	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		3.30.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	3 Dokumen	5,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0		85,000,000.00		32,500,000.00		31,895,189.00		212,199,500.00		212,199,500.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	25,000,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 Unit	0 Unit	0.00	7 Unit	11,500,000.00	10 Unit	20,895,189.00	2 Unit	2,500,000.00	19 Unit	2,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	4 Unit	30,000,000.00	1 Unit	11,000,000.00	1 Unit	11,000,000.00	3 Unit	31,000,000.00	9 Unit	31,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	2 Unit	5,000,000.00	7 Unit	10,000,000.00	0 Unit	0.00	14 Unit	21,000,000.00	23 Unit	21,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	25,000,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	157,699,500.00	50 Unit	157,699,500.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		315,400,000.00		315,400,000.00		315,400,000.00		315,400,000.00		315,400,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2,000,000.00	12 Laporan	2,000,000.00	12 Laporan	2,000,000.00	12 Laporan	2,000,000.00	48 Laporan	2,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000.00	12 Laporan	35,000,000.00	12 Laporan	35,000,000.00	12 Laporan	35,000,000.00	48 Laporan	35,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	278,400,000.00	12 Laporan	278,400,000.00	12 Laporan	278,400,000.00	12 Laporan	278,400,000.00	48 Laporan	278,400,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		48,000,000.00		72,000,000.00		65,500,000.00		71,000,000.00		71,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	28,000,000.00	7 Unit	50,000,000.00	7 Unit	50,500,000.00	7 Unit	53,000,000.00	7 Unit	53,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0 Unit	0.00	2 Unit	5,000,000.00	0 Unit	0.00	1 Unit	3,000,000.00	3 Unit	3,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1 Unit	5,000,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	12,000,000.00	1 Unit	7,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	8,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	34 Unit	5,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi Perdagangan	25 %	27,78 %	120,000,000.00	30,56 %	100,000,000.00	33,33 %	125,000,000.00	36,11 %	125,000,000.00	36,11 %	125,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0		100,000,000.00		90,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	90,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	4 Unit	100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		0		20,000,000.00		10,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	4 Dokumen	25,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya harga barang	19 Wilayah	19 Wilayah	140,000,000.00	19 Wilayah	152,000,000.00	19 Wilayah	175,000,000.00	19 Wilayah	170,000,000.00	19 Wilayah	170,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		0		140,000,000.00		152,000,000.00		175,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	4 Laporan	25,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	22,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	4 Laporan	20,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yangBerdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	105,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	4 Laporan	125,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen	32,32 %	38,67 %	115,000,000.00	38,67 %	125,000,000.00	38,67 %	222,000,000.00	38,67 %	259,000,000.00	38,67 %	259,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		0		115,000,000.00		125,000,000.00		222,000,000.00		259,000,000.00		259,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	415 Unit	415 Unit	70,000,000.00	415 Unit	60,000,000.00	415 Unit	140,000,000.00	415 Unit	150,000,000.00	415 Unit	150,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	375 Orang	530 Orang	30,000,000.00	530 Orang	30,000,000.00	530 Orang	40,000,000.00	530 Orang	50,000,000.00	530 Orang	50,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0	50 Unit	15,000,000.00	50 Unit	35,000,000.00	50 Unit	42,000,000.00	50 Unit	59,000,000.00	200 Unit	59,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan IKM yang difasilitasi	13,63 %	18,18 %	175,000,000.00	22,73 %	200,000,000.00	27,27 %	292,000,000.00	31,82 %	312,000,000.00	31,82 %	312,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam		0		175,000,000.00		200,000,000.00		292,000,000.00		312,000,000.00		312,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9 UMKM	3 UMKM	75,000,000.00	3 UMKM	70,000,000.00	3 UMKM	120,000,000.00	3 UMKM	100,000,000.00	12 UMKM	100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail,	0	5 UMKM	55,000,000.00	5 UMKM	65,000,000.00	5 UMKM	102,000,000.00	5 UMKM	127,000,000.00	20 UMKM	127,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	65,000,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	1 Dokumen	85,000,000.00	4 Dokumen	85,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil Pertanian	0	15,15 %	250,000,000.00	30,3 %	233,000,000.00	45,45 %	263,000,000.00	60,61 %	308,000,000.00	60,61 %	308,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		0		250,000,000.00		233,000,000.00		263,000,000.00		308,000,000.00		308,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	1 Dokumen	140,000,000.00	1 Dokumen	115,000,000.00	1 Dokumen	140,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen	150,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	4 Dokumen	70,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanIndustri	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	58,000,000.00	1 Dokumen	78,000,000.00	1 Dokumen	88,000,000.00	4 Dokumen	88,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, dengan indikator Kinerja sasaran mengukur keberhasilannya dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No .	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,33	1,25	1,75	2,15	2,94	2,94
2	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,59	4,61	4,65	4,71	4,71
3	Laju inflasi daerah	-2,02	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55

Selain indikator diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam bidang urusan Perindustrian dan Perdagangan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan indikator target kinerja dapat dilihat pada tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2 Target kinerja bidang urusan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PERDAGANGAN						
	Presentase kinerja realisasi pupuk	41,396% <i>1.409,85 ton dari 3.405,774 ton</i>	100% <i>1 3.405,774 ton</i>	100% <i>1 3.405,774 ton</i>	100% <i>1 3.405,774 ton</i>	100% <i>1 3.405,774 ton</i>	100% <i>13.623,096 ton</i>
	Presentase alat – alat ukur timang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	49% <i>415 UTTP+350 pelaku usaha dari 1914 UTTP+ 530 pelaku usaha</i>	49% <i>415 UTTP+350 pelaku usaha dari 1914 UTTP + 530 pelaku usaha</i>	49% <i>415 UTTP+350 pelaku usaha dari 1914 UTTP + 530 pelaku usaha</i>	49% <i>415 UTTP+350 pelaku usaha dari 1914 UTTP + 530 pelaku usaha</i>	49% <i>415 UTTP+350 pelaku usaha dari 1914 UTTP + 530 pelaku usaha</i>	49% <i>415 UTTP+350 pelaku usaha dari 1914 UTTP + 530 pelaku usaha</i>
2	PERINDUSTRIAN						
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13,63% <i>9 IKM/66 IKM</i>	15% <i>10 IKM/66 IKM</i>	15% <i>10 IKM/66 IKM</i>	15% <i>10 IKM/66 IKM</i>	15% <i>10 IKM/66 IKM</i>	60,66% <i>40 IKM/66 IKM</i>
	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

BAB VIII

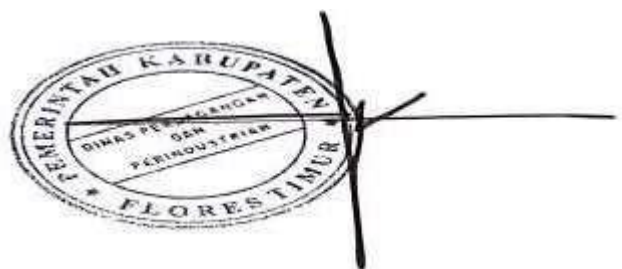
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2023- 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah , memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Disperdagind).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

Larantuka, Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur



Siprianus Sina Ritan.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001231 199903 1 056

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
2022